



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan GUMELAR tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Gumelar tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp 2.265.919.414,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1.424.390.414,00. dan belanja langsung Rp. 791.859.000,00 Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 menjadi Rp. 2.231.534.709,00 dengan belanja tidak langsung Rp. 1.390.005.709,00 dan belanja langsung Rp 895.784.600,00. Penyerapan anggaran belanja langsung Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 879.441.295,00 (98,17%) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 895.784.600,00. Program Peningkatan Kecamatan dan Kelurahan merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (98,00%), sedangkan Program Pelayanan Perkantoran menunjukkan serapan terkecil yaitu 80,00%.

Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari tiga program dan 16 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Gumelar Tahun 2022
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2022

Unker : KECAMATAN GUMELAR

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan | Satuan | 2022 | | Sumber Dana | Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|--|---|---|--------|---|----------------|-------------|--|
| | | | | | Target | Rp. | | |
| | | | | | Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | | | |
| | Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | | Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu | % | 100 | 72,000,517,000 | PAD | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36,380,000 | PAD | |
| | | | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | % | 100 | 36,380,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Keg | 1000 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-----|------------|-----|--|
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 0 | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 36,380,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan | Jenis | 10 | 36,380,000 | PAD | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | 0 | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 36,380,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | Desa | 10 | 36,380,000 | PAD | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 64,329,000 | PAD | |
| | | | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 64,329,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 64,329,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Desa | 10 | 64,329,000 | PAD | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 3,010,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----|------------|-----|--|
| | | | jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Orang | 10 | 3,010,000 | PAD | |
| | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 61,319,000 | PAD | |
| | | | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | Kali | 36 | 61,319,000 | PAD | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 15,052,000 | PAD | |
| | | | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 15,052,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 5,017,000 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Keg | 10 | 5,017,000 | PAD | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 3,010,000 | PAD | |
| | | | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan | unsur | 5 | 3,010,000 | PAD | |
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 2,007,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-----|------------|-----|--|
| | | | Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat | Kali | 3 | 2,007,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 10,035,000 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Keg | 5 | 10,035,000 | PAD | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 10,035,000 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan pembinaan Linmas | Keg | 12 | 10,035,000 | PAD | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 5,015,000 | PAD | |
| | | | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | % | 100 | 5,015,000 | PAD | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 5,015,000 | PAD | |
| | | | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Desa | 10 | 5,015,000 | PAD | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa | | | | 5,015,000 | PAD | |
| | | | Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes | Kali | 4 | 5,015,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|--|
| | | Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 0 | PAD | |
| | | | Frekwensi Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kali | | 0 | PAD | |
| | | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 0 | | |
| | | Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2,556,183,000 | PAD | |
| | | | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 2,883,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2,883,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun | Dokumen | 5 | 2,883,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1,017,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | Dokumen | 6 | 1,017,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1,866,000 | PAD | |
| | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 5 | 1,866,000 | PAD | |
| | | | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 1,807,929,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1,807,929,000 | PAD | |
| | | | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | Jenis | 12 | 1,807,929,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-----|---------------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1,774,811,000 | PAD | |
| | | | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan | Orang | 11 | 1,774,811,000 | DAU | |
| | | X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 33,118,000 | PAD | |
| | | | Jumlah pengelola keuangan SKPD | Orang | 12 | 33,118,000 | PAD | |
| | | | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | % | 100 | 219,044,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 57,783,000 | PAD | |
| | | | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Unit | 4 | 57,783,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57,783,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia | Jenis | 4 | 57,783,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | PAD | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | Unit | 0 | 0 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 161,261,000 | PAD | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan | Jenis | 2 | 161,261,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50,179,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-----|-------------|-----|--|
| | | | Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara | Unit | 9 | 50,179,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 11,561,000 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 11,561,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35,574,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara | Unit | 2 | 35,574,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 63,947,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 63,947,000 | PAD | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan | Bulan | 2 | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 526,327,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|----|-------------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 312,117,000 | PAD | |
| | | | Tersedianya pelayanan Administrasi Umum | Bulan | 12 | 312,117,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 66,482,000 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Jenis | 10 | 66,482,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20,104,000 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Jenis | 6 | 20,104,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 110,420,000 | PAD | |
| | | | Jumlah logistik kantor yang tersedia | Bulan | 15 | 110,420,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 14,937,000 | PAD | |
| | | | Jumlah cetakan yang tersedia | Buah | 2 | 14,937,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100,174,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | Kali | 12 | 100,174,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 214,210,000 | PAD | |
| | | | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Jenis | 12 | 214,210,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 35,032,000 | PAD | |
| | | | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | Bulan | 3 | 35,032,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|-------------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 28,100,000 | PAD | |
| | | | Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 28,100,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 151,078,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Pegawai Non ASN | Orang | 6 | 151,078,000 | PAD | |

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kecamatan Gumelar

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | | | 9 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|--|--|--|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8=(7/6) | | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | Target Program dan Kegiatan (Renja) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| | Mewujudkan kinerja pelayanan | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 | 83 | 84 | 84 | 101,2 | | 84 | 97 |
| | Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | | | | | | 103 | | 84 | 84 |
| | | Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | | Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif | % | 100 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan | | | | | | | 100 | | 80 | 0 |
| | | Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | | Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10=5+7+9 | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---------------------|---|--|--|
| | | | | | | 7 | 8=(7/6) | 11=10/4 | | | | |
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | Persentase pembayaran PBB di kecamatan | % | 100 | 85 | 85 | 95 | 95 | | | 95 | 101 |
| | | Persentase kelompok swadaya masyarakat di | % | 90 | 85 | 85 | 85 | 100 | | | 85 | 94 |
| | | Persentase Linmas terbina | % | 90 | 85 | 85 | 85 | 100 | | | 85 | 94 |
| | Fasilitasi penyelenggaraan | | | | | | | 100 | | | 85 | 0 |
| | | pemohon PATEN yang terlayani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | penyelenggaraan pelayanan kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| | Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan | | | | | | | 100 | | | 100 | 0 |
| | | Pelaksanaan Musrenbang di desa / kelurahan dan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|----|---|---|---|-----|--|---|----|
| | | Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan | Kali | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | | 8 | 40 |
| | | kegiatan perencanaan dan pembangunan desa / kelurahan yang terfasilitasi | Kali | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | | 2 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10=5+7+ | |
|---|--|---|------|--|---|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 7 | 8=(7/6) | 11=10/4 | | | |
| | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) | Realisasi Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7+ | 11=10/4 | |
| | | kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan Dana Desa / | Kali | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | | 5 | 100 |
| | Fasilitasi Intensifikasi PBB | | | | | | | 100 | | 100 | 100 |
| | | Persentase PBB yang dapat terbayar | % | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulan Kemiskinan Kecamatan | | | | | | | 99 | | 91.72 | 90 |
| | | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Kali | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | 90 | 90 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | | | | | | | 100 | | 32 | 100 |
| | penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | pelaksanaan rakor Linmas | Kali | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | | | 10 | 100 |
| | pembinaan kepada linmas | Kali | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | | | 10 | 100 |
| | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| | Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan GUMELAR | | | | | | | 100 | | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | | | 9 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|--|------|--|---|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | 6 | 7 | 8=(7/6) | | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| | | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes | Kali | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 40 |
| | | Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes | Kali | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 40 |
| | | Prosentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan APBDes dan monitoring evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | | | 100 | | 100 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|
| | | Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | | Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | 100 | 0 |
| | | Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Dokumen | 25 | 5 | 5 | 5 | 100 | | 10 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10=5+7+9 | | 11=10/4 |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---------------------|--|--|---------|
| | | | | | | 7 | 8=(7/6) | 8 | | 9 | | |
| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| | Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan | Kali | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | | 8 | 40 | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran | | | | | | 100 | | 8 | 0 | | |
| | Persentase realisasi fisik program | % | 100 | 90 | 100 | 95.78 | 95 | | 95.78 | 95 | | |
| | Persentase realisasi keuangan program | % | 100 | 90 | 100 | 86.39 | 86 | | 86.39 | 86 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------|-----|
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah | | | | | | | 86 | | 86.39 | 0 |
| | | Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |
| | | Jasa transaksi keuangan yang dibayar | Lump | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | | 1 | 20 |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | | | | | | | 100 | | 1 | 0 |
| | | bahan perlengkapan kerja tersedia | Bulan | 60 | 1 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |
| | | alat listrik dan elektronik yang tersedia | Jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 200 |
| | | perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia | Buah | 185 | 150 | 165 | 165 | 100 | | 315 | 170 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10=5+7+9 | | | |
|---|---|---|-------|--|---|--|---|--|---------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | 7 | 8=(7/6) | 11=10/4 | | | | | |
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia | Bulan | 12 | 1 | 12 | 12 | 100 | | | 12 | 100 | |
| | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | | | 12 | 100 | |
| | | cetak dan penggandaan yang tersedia | lbr | 3677 | 40000 | 45000 | 30421 | 67 | | | 70421 | 2630 | |
| | Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan | | | | | | | 67 | | | 70421 | 0 | |
| | | Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | | 12 | 20 | |
| | Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | | 12 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|----|----|----|-----|--|----|-----|
| | | Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | 12 | 0 |
| | | peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia | Jenis | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | | 20 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|--|---|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 7 | 8=(7/6) | 10=5+7+9 | | 11=10/ | |
| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020 | Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun | Tingkat Realisasi % | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | 20 | 0 |
| | | peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | 12 | 0 |
| | | gedung pemerintah dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | 100 | 0 |
| | | kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|----|----|----|----|-----|--|----|----|
| | | kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |
| | Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah | | | | | | | 100 | | 12 | 0 |
| | | Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan | Bulan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | | 12 | 20 |

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok
membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Gumelar mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
 - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;

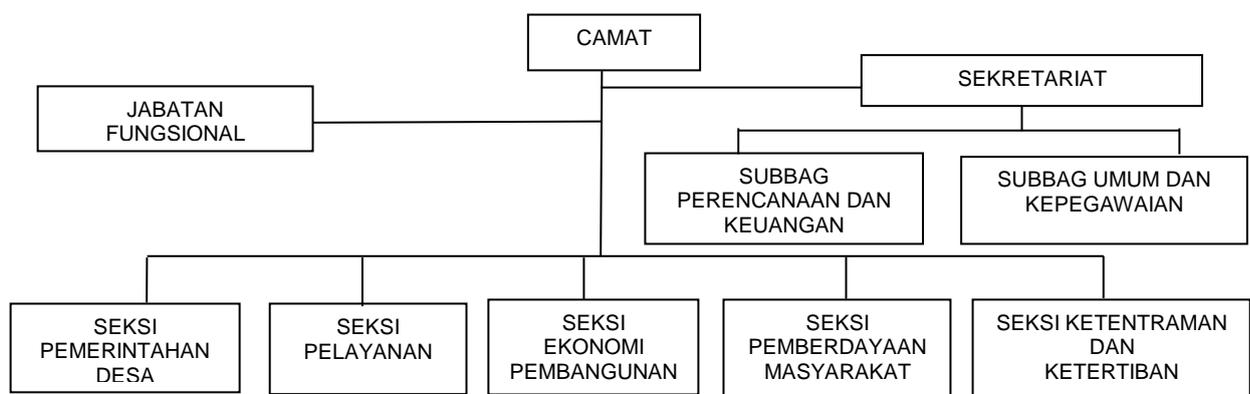
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Gambar 1. Struktur organisasi Kecamatan GUMELAR adalah sebagai berikut:



Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp 2.239.579.229,00 terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

| No | Aspek/Program/Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Tingkat Capaian RKPD 2020 | Kenaikan/Penurunan |
|----|--|--------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| A | Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | |
| 1 | Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik | % | 100 | 85 | 80 | 100 | 5 |
| 3 | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Persentase pembayaran PBB di kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Persentase Linmas terbina | % | 100 | 85 | 85 | 100 | 0 |
| B | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | | | | | | |
| 1 | Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| C | Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran | | | | | | |
| 1 | Persentase realisasi fisik program | % | 100 | 96 | 90 | 96 | 6 |
| 2 | Persentase realisasi keuangan program | % | 100 | 95 | 90 | 95 | 5 |

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Kurang pemahamannya masyarakat mengenai syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya jumlah petugas pelayanan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Gumelar
4. Masih seringnya terjadi kendala pada sistem milik Dindukcapil yang berada di Kecamatan dan belum sinkronnya aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan catatan sipil.
5. Belum optimalnya kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gumelar Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta

penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. SDM Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 10 orang yang didominasi oleh pendidikan S1 dan SLTA. Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan antara lain:

- Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
- Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan

mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;
7. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gumelar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kajian strategi daerah
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
6. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah
7. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan ekonomi
8. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia
9. Meningkatkan pelayanan perkantoran
10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menunjukkan Kecamatan Gumelar memiliki 5 program dan 11 kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Gumelar Tahun 2022
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2022

Unker : KECAMATAN GUMELAR

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan | Satuan | 2022 | | Sumber Dana | Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|--------|--|---|---|--------|---|----------------|-------------|--|
| | | | | | Target | Rp. | | |
| | | | | | Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | | | |
| | Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | | Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu | % | 100 | 72,000,517,000 | PAD | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36,380,000 | PAD | |
| | | | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | % | 100 | 36,380,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|------|------------|-----|--|
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Keg | 1000 | 0 | | |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 0 | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 0 | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 36,380,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan | Jenis | 10 | 36,380,000 | PAD | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | 0 | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 36,380,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | Desa | 10 | 36,380,000 | PAD | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 64,329,000 | PAD | |
| | | | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 64,329,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 64,329,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----|------------|-----|--|
| | | | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Desa | 10 | 64,329,000 | PAD | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 3,010,000 | PAD | |
| | | | jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Orang | 10 | 3,010,000 | PAD | |
| | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 61,319,000 | PAD | |
| | | | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | Kali | 36 | 61,319,000 | PAD | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 0 | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 15,052,000 | PAD | |
| | | | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 15,052,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 5,017,000 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Keg | 10 | 5,017,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|----|------------|-----|--|
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 3,010,000 | PAD | |
| | | | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan | unsur | 5 | 3,010,000 | PAD | |
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 2,007,000 | PAD | |
| | | | Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat | Kali | 3 | 2,007,000 | PAD | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 10,035,000 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Keg | 5 | 10,035,000 | PAD | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 10,035,000 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan pembinaan Linmas | Keg | 12 | 10,035,000 | PAD | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 5,015,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-----|---------------|-----|--|
| | | | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | % | 100 | 5,015,000 | PAD | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 5,015,000 | PAD | |
| | | | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Desa | 10 | 5,015,000 | PAD | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 0 | | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 5,015,000 | PAD | |
| | | | Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes | Kali | 4 | 5,015,000 | PAD | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 0 | PAD | |
| | | | Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kali | | 0 | PAD | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 0 | | |
| | | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2,556,183,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|-----|---------------|-----|--|
| | | | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 2,883,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2,883,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun | Dokumen | 5 | 2,883,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1,017,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | Dokumen | 6 | 1,017,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1,866,000 | PAD | |
| | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 5 | 1,866,000 | PAD | |
| | | | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 1,807,929,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1,807,929,000 | PAD | |
| | | | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | Jenis | 12 | 1,807,929,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1,774,811,000 | PAD | |
| | | | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | Orang | 11 | 1,774,811,000 | DAU | |
| | | X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 33,118,000 | PAD | |
| | | | Jumlah pengelola keuangan SKPD | Orang | 12 | 33,118,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-----|-------------|-----|--|
| | | | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | % | 100 | 219,044,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 57,783,000 | PAD | |
| | | | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Unit | 4 | 57,783,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57,783,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia | Jenis | 4 | 57,783,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | PAD | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | Unit | 0 | 0 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 161,261,000 | PAD | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan | Jenis | 2 | 161,261,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50,179,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara | Unit | 9 | 50,179,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 11,561,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|----|------------|-----|--|
| | | | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 11,561,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35,574,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara | Unit | 2 | 35,574,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 63,947,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 63,947,000 | PAD | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan | Bulan | 2 | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 0 | | |
| | | X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|-----|-------------|-----|--|
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 526,327,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 312,117,000 | PAD | |
| | | | Tersedianya pelayanan Administrasi Umum | Bulan | 12 | 312,117,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 66,482,000 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Jenis | 10 | 66,482,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20,104,000 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Jenis | 6 | 20,104,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 110,420,000 | PAD | |
| | | | Jumlah logistik kantor yang tersedia | Bulan | 12 | 110,420,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 14,937,000 | PAD | |
| | | | Jumlah cetakan yang tersedia | Buah | | 14,937,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100,174,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | Kali | 12 | 100,174,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 214,210,000 | PAD | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|----|-------------|-----|--|
| | | | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Jenis | 12 | 214,210,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 35,032,000 | PAD | |
| | | | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | Bulan | 3 | 35,032,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 28,100,000 | PAD | |
| | | | Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 28,100,000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 151,078,000 | PAD | |
| | | | Jumlah Pegawai Non ASN | Orang | 6 | 151,078,000 | PAD | |

Tabel T-C.31

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 KECAMATAN GUMELAR
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

| Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | |
|---|---|---|---------------|--------------|------|---------------|------------------------------|------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| KECAMATAN | | | 3,652,546,000 | 0 | 0 | 3,652,546,000 | | 3,683,071,000 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 3,542,509,000 | 0 | 0 | 3,542,509,000 | 100 % | 3,572,144,000 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 6 dokumen | 3,712,000 | 0 | 0 | 3,712,000 | 5 dokumen | 3,744,000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 2 dokumen | 1,856,000 | 0 | 0 | 1,856,000 | 1 dokumen | 1,872,000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 4 kegiatan | 1,856,000 | 0 | 0 | 1,856,000 | 4 kegiatan | 1,872,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan | 21 orang | 3,012,930,000 | 0 | 0 | 3,012,930,000 | 21 orang | 3,038,110,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | |
|--|---|---|--------------------|-----------|------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | 21 orang | 2,980,715,000 | 0 | 0 | 2,980,715,000 | 21 orang | 3,005,626,000 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelola keuangan SKPD | 9 orang | 32,215,000 | 0 | 0 | 32,215,000 | 9 orang | 32,484,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum yang dikelola | 12 bulan | 192,537,000 | 0 | 0 | 192,537,000 | 12 bulan | 194,147,000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia | 12 jenis | 14,187,000 | 0 | 0 | 14,187,000 | 12 jenis | 14,306,000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 20 jenis | 16,266,000 | 0 | 0 | 16,266,000 | 20 jenis | 16,402,000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 12 jenis | 5,017,000 | 0 | 0 | 5,017,000 | 20 jenis | 5,059,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | |
|--|---|--|------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber | | | | | | |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik kantor yang tersedia | 12 jenis | 47,671,000 | 0 | 0 | 47,671,000 | 12 jenis | 48,069,000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia | 25 buah 15.000 lem | 11,039,000 | 0 | 0 | 11,039,000 | 25 buah 15.000 lem | 11,132,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi / konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi / pusat yang dilaksanakan | 70 kali | 98,357,000 | 0 | 0 | 98,357,000 | 70 kali | 99,179,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | 4 unit | 77,346,000 | 0 | 0 | 77,346,000 | 4 unit | 77,991,000 |
| Pengadaan meubeler kantor | Jumlah meubeler kantor yang tersedia | 4 unit | 16,057,000 | | | 16,057,000 | 4 unit | 16,191,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia | 4 jenis | 47,239,000 | 0 | 0 | 47,239,000 | 4 jenis | 47,633,000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | 4 unit | 14,050,000 | 0 | 0 | 14,050,000 | 3 unit | 14,167,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023 | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | | | Total |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | 12 bulan | 201,792,000 | 0 | 0 | 201,792,000 | 12 bulan | 203,477,000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | 12 bulan | 47,212,000 | 0 | 0 | 47,212,000 | 12 bulan | 47,606,000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan | 5 jenis | 9,283,000 | 0 | 0 | 9,283,000 | 5 jenis | 9,360,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pegawai Non ASN | 6 orang | 145,297,000 | 0 | 0 | 145,297,000 | 6 orang | 146,511,000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan | 8 unit | 54,192,000 | 0 | 0 | 54,192,000 | 8 unit | 54,645,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara | 8 unit | 34,122,000 | 0 | 0 | 34,122,000 | 8 unit | 34,407,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023 | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 unit | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 25 unit 10,119,000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara | 1 unit | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 3 unit 10,119,000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | 100 % | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | 100 % 12,876,000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani | 100 % | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | 100 % 12,876,000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pemohon PATEN yang terlayani | 100 % | 6,749,000 | 0 | 0 | 6,749,000 | 100 % 6,805,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023 | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | 15 desa | 6,021,000 | 0 | 0 | 6,021,000 | 15 desa 6,071,000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100 % | 33,041,000 | 0 | 0 | 33,041,000 | 100 % 33,318,000 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100 orang | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | 100 orang 12,877,000 |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | 45 kali | 5,218,000 | 0 | 0 | 5,218,000 | 45 kali 5,262,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023 | |
|--|--|-----------------------------------|------------|--------------|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 12 kali | 15,053,000 | 0 | 0 | 15,053,000 | 12 kali | 15,179,000 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 25,087,000 | 0 | 0 | 25,087,000 | 100 % | 25,297,000 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 100 % | 15,052,000 | 0 | 0 | 15,052,000 | 100 % | 15,178,000 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan | 6 unsur | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 6 unsur | 10,119,000 |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat | 15 kali | 5,017,000 | 0 | 0 | 5,017,000 | 15 kali | 5,059,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terrlaksananya pembinaan linmas | 15 kegiatan | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 15 kegiatan | 10,119,000 |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan Linmas | 15 keg | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 15 keg | 10,119,000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | 39,139,000 | 0 | 0 | 39,139,000 | 100 % | 39,466,000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi | 1 dok | 29,104,000 | 0 | 0 | 29,104,000 | 1dok | 29,347,000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes | 12 kali | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 12 kali | 10,119,000 |
| | | | 3,652,5460, | 0 | 0 | 3,652,5460,000 | | 3,683,071,000 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada **“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Gumelar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati

Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan GUMELAR Kabupaten Banyumas Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

| TUJUAN | SASARAN |
|---|--|
| Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat |

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Gumelar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Gumelar dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Gumelar mempunyai 5 program dan 11 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima seksi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 2,973,483,000,00 dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp 2,973,483,000,00 Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | |
|--|---|--|--------------------|-----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 201,792,800 | 0 | 0 | 201,792,800 | | 203,477,800 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | 12 bulan | 47,212,200 | 0 | 0 | 47,212,200 | 12 bulan | 47,606,200 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan | 5 jenis | 9,283,000 | 0 | 0 | 9,283,000 | 5 jenis | 9,360,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pegawai Non ASN | 6 orang | 145,297,600 | 0 | 0 | 145,297,600 | 6 orang | 146,511,600 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 54,192,000 | 0 | 0 | 54,192,000 | | 54,645,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara | 8 unit | 34,122,00 | 0 | 0 | 34,122,00 | 8 unit | 34,407,00 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | |
|--|---|--|-------------------|-----------|------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | 25 unit | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 25 unit | 10,119,000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara | 1 unit | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 3 unit | 10,119,000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | | 12,876,000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | | 12,876,000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani | 20400 orang | 6,749,000 | 0 | 0 | 6,749,000 | 20400 orang | 6,805,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | |
|--|---|--|-------------------|-----------|------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber | | | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | 15 desa | 6,021,000 | 0 | 0 | 6,021,000 | 15 desa | 6,071,000 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 33,041,000 | 0 | 0 | 33,041,000 | | 33,318,000 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 15 Desa | 33,041,000 | 0 | 0 | 33,041,000 | 15 Desa | 33,318,000 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100 orang | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | 100 orang | 12,877,000 |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | 45 kali | 5,218,000 | 0 | 0 | 5,218,000 | 45 kali | 5,262,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | |
|---|---|--|-------------------|-----------|------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 12 kali | 15,053,000 | 0 | 0 | 15,053,000 | 12 kali | 15,179,000 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 25,087,000 | 0 | 0 | 25,087,000 | | 25,297,000 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 15,052,000 | 0 | 0 | 15,052,000 | | 15,178,000 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan | 6 unsur | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 6 unsur | 10,119,000 |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat | 15 kali | 5,017,000 | 0 | 0 | 5,017,000 | 15 kali | 5,059,000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Prakiraan Maju Tahun 2023 | |
|---|--|--|----------------------|-----------|------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | | 10,119,000 |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan Linmas | 15 keg | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 15 keg | 10,119,000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | 39,139,000 | 0 | 0 | 39,139,000 | 100 % | 39,466,000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 20 Desa | 39,139,000 | 0 | 0 | 39,139,000 | 20 Desa | 39,466,000 |
| | Jumlah Perdes dan Perkades yang terfasilitasi | 1 dokumen | 29,104,000 | | | 29,104,000 | | 29,347,000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes | 12 kali | 10,035,000 | 0 | 0 | 10,035,000 | 12 kali | 11,612,000 |
| | | | 3,652,546,000 | 0 | 0 | 3,652,546,000 | | 3,683,071,000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : KECAMATAN GUMELAR

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Pendanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab |
|---|--|----------------------|---|--------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| TOTAL | | | | | | 2324437879 | | 2673253000 | | 2710269000 | | 7707959879 | PAD | |
| Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan | | 84 | 2324437879 | 85 | 2673253000 | 86 | 2710269000 | 90 | 7707959879 | PAD | |
| | Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat | | Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu | % | 100 | 6248343073 3 | 100 | 7188005100 0 | 100 | 7283757100 0 | 100 | 20720105273 3 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|-----------|-----|--|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36250000 | | 35280000 | | 36684000 | | 108214000 | PAD | |
| | | | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | % | 100 | 36250000 | 100 | 35280000 | 100 | 36684000 | 100 | 108214000 | PAD | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Keg | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 3000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----|--|
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 36250000 | | 35280000 | | 36684000 | | 108214000 | PAD | |
| | | Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan | Jenis | 2 | 36250000 | 2 | 35280000 | 2 | 36684000 | 2 | 108214000 | PAD | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|-----|--|
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 36250000 | | 35280000 | | 36684000 | | 108214000 | PAD | |
| | | | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | Desa | 10 | 36250000 | 10 | 35280000 | 10 | 36684000 | 10 | 108214000 | PAD | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 64100000 | | 74445000 | | 64866000 | | 203411000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|--|
| | | | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 64100000 | 100 | 74445000 | 100 | 64866000 | 100 | 203411000 | PAD | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 64100000 | | 74445000 | | 64866000 | | 203411000 | PAD | |
| | | | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Desa | 10 | 64100000 | 10 | 74445000 | 10 | 64866000 | 10 | 203411000 | PAD | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 3000000 | | 10195000 | | 3035000 | | 16230000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|--|
| | | | jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Orang | 50 | 3000000 | 200 | 10195000 | 200 | 3035000 | 450 | 16230000 | PAD | |
| | | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | 61100000 | | 64250000 | | 61831000 | | 187181000 | PAD | |
| | | | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | Kali | 36 | 61100000 | 36 | 64250000 | 36 | 61831000 | 108 | 187181000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--|
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 15000000 | | 11958200 | | 15177000 | | 42135200 | PAD | |
| | | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 15000000 | 100 | 11958200 | 100 | 15177000 | 100 | 42135200 | PAD | | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 5000000 | | 0 | | 5058000 | | 10058000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|----|---------|----|---|----|---------|----|----------|-----|--|
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Keg | 10 | 5000000 | 10 | 0 | 10 | 5058000 | 30 | 10058000 | PAD | |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 3000000 | | 0 | | 3035000 | | 6035000 | PAD | |
| | | | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan | unsur | 5 | 3000000 | 0 | 0 | 5 | 3035000 | 15 | 6035000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|-----|--|
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 2000000 | 0 | | | 2023000 | | 4023000 | PAD | |
| | | | Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat | Kali | 3 | 2000000 | 0 | 0 | 3 | 2023000 | 9 | 4023000 | PAD | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 10000000 | | 11958200 | | 10119000 | | 32077200 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Keg | 2 | 10000000 | 2 | 11958200 | 2 | 10119000 | 6 | 32077200 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|-----|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|-----|--|
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 10000000 | | 11958200 | | 10119000 | | 32077200 | PAD | |
| | | | Jumlah kegiatan pembinaan Linmas | Keg | 12 | 10000000 | 12 | 11958200 | 12 | 10119000 | 36 | 32077200 | PAD | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 4998000 | | 0 | | 20057000 | | 25055000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-----|---------|-----|---|-----|----------|-----|----------|-----|--|
| | | | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | % | 100 | 4998000 | 100 | 0 | 100 | 20057000 | 100 | 25055000 | PAD | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 4998000 | | 0 | | 20057000 | | 25055000 | PAD | |
| | | | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Desa | 10 | 4998000 | 10 | 0 | 10 | 20057000 | 10 | 25055000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|---------|---------|---|---|----------|----|----------|-----|--|
| | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 4998000 | 0 | | 5057000 | | 10055000 | PAD | |
| | | Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes | Kali | 4 | 4998000 | 0 | 0 | 4 | 5057000 | 12 | 10055000 | PAD | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 0 | 0 | | 15000000 | | 15000000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|-----|--|
| | | | Frekwensi Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kali | | 0 | | 0 | 1 | 15000000 | 1 | 15000000 | PAD | |
| | | | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | |
| | | | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 2204089879 | | 2551569800 | | 2573485000 | | 7329144679 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|--|
| | | | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 2873900 | 100 | 5575000 | 100 | 2908000 | 100 | 11356900 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2873900 | | 5575000 | | 2908000 | | 11356900 | PAD | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun | Dokumen | 4 | 2873900 | 3 | 5575000 | 3 | 2908000 | 10 | 11356900 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1013900 | | 1975000 | | 1026000 | | 4014900 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | Dokumen | 4 | 1013900 | 3 | 1975000 | 3 | 1026000 | 10 | 4014900 | PAD |
| | | X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1860000 | | 3600000 | | 1882000 | | 7342000 | PAD |
| | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 1860000 | 3 | 3600000 | 3 | 1882000 | 10 | 7342000 | PAD |
| | | | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 1557569155 | 100 | 1807799500 | 100 | 1823039000 | 100 | 5188407655 | PAD |
| | | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1557569155 | | 1807799500 | | 1823039000 | | 5188407655 | PAD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--|
| | | | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | Jenis | 3 | 1557569155 | 3 | 1807799500 | 3 | 1823039000 | 3 | 5188407655 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1529019155 | | 1774799500 | | 1789644000 | | 5093462655 | PAD | |
| | | | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | Orang | 11 | 1529019155 | 11 | 1774799500 | 11 | 1789644000 | 11 | 5093462655 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 28550000 | | 33000000 | | 33395000 | | 94945000 | PAD | |
| | | | Jumlah pengelola keuangan SKPD | Orang | 4 | 28550000 | 4 | 33000000 | 4 | 33395000 | 4 | 94945000 | PAD | |
| | | | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai | % | 100 | 198529950 | 100 | 221435000 | 100 | 220875000 | 100 | 640839950 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---|-----------|---|----------|---|----------|----|-----------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 107555250 | | 60000000 | | 58266000 | | 225821250 | PAD | |
| | | | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Jenis | 1 | 107555250 | 1 | 60000000 | 2 | 58266000 | 4 | 225821250 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57576750 | | 60000000 | | 58266000 | | 175842750 | PAD | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia | Unit | 4 | 57576750 | 4 | 60000000 | 4 | 58266000 | 12 | 175842750 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 49978500 | | 0 | | 0 | | 49978500 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----|--|
| | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | Unit | 1 | 49978500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49978500 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 90974700 | | 161435000 | | 162609000 | | 415018700 | PAD | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan | Jenis | 4 | 90974700 | 4 | 161435000 | 4 | 162609000 | 4 | 415018700 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|---|----------|---|----------|---|----------|---|-----------|-----|
| | | | Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan | Jenis | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | | X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 35700000 | | 50400000 | | 50598000 | | 136698000 | PAD |
| | | | Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara | Unit | 9 | 35700000 | 9 | 50400000 | 9 | 50598000 | 9 | 136698000 | PAD |
| | | X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 11520000 | | 11860000 | | 11657000 | | 35037000 | PAD |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|-----|
| | | | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 11520000 | 20 | 11860000 | 20 | 11657000 | 20 | 35037000 | PAD |
| | | X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 30013500 | | 35750000 | | 35872000 | | 101635500 | PAD |
| | | | Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara | Unit | 2 | 30013500 | 2 | 35750000 | 2 | 35872000 | 2 | 101635500 | PAD |
| | | X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 13741200 | | 63425000 | | 64482000 | | 141648200 | PAD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|--|
| | | | Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 13741200 | 4 | 63425000 | 4 | 64482000 | 4 | 141648200 | PAD | |
| | | | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan | Bulan | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 445116874 | 100 | 516760300 | 100 | 526663000 | 100 | 1488540174 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 239671850 | | 308806700 | | 310663000 | | 859141550 | PAD | |
| | | | Jumlah administrasi umum yang dikelola | Jenis | 6 | 239671850 | 6 | 308806700 | 6 | 310663000 | 6 | 859141550 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50199150 | | 65638000 | | 67038000 | | 182875150 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Jenis | 4 | 50199150 | 4 | 65638000 | 4 | 67038000 | 16 | 182875150 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 14982000 | | 20157000 | | 20272000 | | 55411000 | PAD | |
| | | | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Jenis | 6 | 14982000 | 6 | 20157000 | 6 | 20272000 | 6 | 55411000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 84920800 | | 111335700 | | 111342000 | | 307598500 | PAD | |
| | | | Jumlah logistik kantor yang tersedia | Bulan | 15 | 84920800 | 15 | 111335700 | 15 | 111342000 | 15 | 307598500 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10888000 | | 11000000 | | 11000000 | | 32888000 | PAD | |
| | | | Jumlah cetakan yang tersedia | Buah | 750 | 3000000 | 750 | 3000000 | 750 | 3000000 | 2350 | 9000000 | PAD | |
| | | | Jumlah penggandaan yang tersedia | lbr | 25000 | 7888000 | 25000 | 8000000 | 25000 | 8000000 | 75000 | 23888000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78681900 | | 100676000 | | 101011000 | | 280368900 | PAD | |
| | | | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | Kali | 12 | 78681900 | 12 | 100676000 | 12 | 101011000 | 36 | 280368900 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----|--|
| | | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 205445024 | | 207953600 | | 216000000 | | 629398624 | PAD | |
| | | | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Jenis | 3 | 205445024 | 3 | 207953600 | 3 | 216000000 | 3 | 629398624 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 34907424 | | 35916000 | | 35325000 | | 106148424 | PAD | |
| | | | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | Bulan | 3 | 34907424 | 3 | 35916000 | 3 | 35325000 | 3 | 106148424 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20000000 | | 21500000 | | 28335000 | | 69835000 | PAD | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|----|-----------|-----|--|
| | | | Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 20000000 | 5 | 21500000 | 5 | 28335000 | 15 | 69835000 | PAD | |
| | | X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 150537600 | | 150537600 | | 152340000 | | 453415200 | PAD | |
| | | | Jumlah Pegawai Non ASN | Orang | 6 | 150537600 | 6 | 150537600 | 6 | 152340000 | 6 | 453415200 | PAD | |

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan GUMELAR tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Gumelar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Gumelar Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Gumelar dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Gumelar menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.



